

DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Buku:

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Amrullah, M. Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Malang: Bayu Media Publishing, 2004.
- Andasmita, Kohar. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Anwar, H.A.K.Moch.. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Jilid I. Bandung: Alumni, 1982.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No. 15 Tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI*, cet. I. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.
- Mamudji, Sri, *et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Saputro, Anke Dwi. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*. Jakarta: PT Gramedia, 2008
- Siahaan, N.H.T., *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Jala Penerbit, 2008.
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004.

Tan, Thong Kie. *Studi Notariat: Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Actiar Baru van Hoeve, 1994.

Tobing, G.H.S. Lumban.. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

Jahya, Juni Sjafrien. *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visi Media, 2014.

B. Bahan Jurnal dan Makalah

Utama, Muhammad Fuat Widyaiswara. “Mengenali Proses Pencucian Uang (*Money Laundering*) dari Hasil Tindak Pidana.” *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP*.

Nugroho, Riki Rahadi, “Pertanggung Jawaban dan Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Yang Dibuat Berdasarkan Dokumen Palsu”, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan, 2015*.

Arkiang, Tri Yanty Sukanty, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Fakultas Hukum Universitas Purwakarta*.

Thedean, Irvin Sianka, “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Akta Notaris”, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan, 2015*

Yunus, Husein, “PPATK; Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Seminar Pencucian Uang, Bank Indonesia, Jakarta, 2003*.

Financial Action Task Force On Money Laundering. “FATF-VII Report on MoneyLaundering Typologies.” Annex 3. 28 June 1996.

Winarno, Made Riyaldi, Bambang, dan Abdul Rachmand Budiono. *Urgensi Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Menucrigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

C. Bahan Perundang-undangan

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*. SE BI Nomor 13/14/DKBU Tanggal 12 Mei 2011.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Mencegah Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*. PBI Nomor 11/28/PBI/2009.

Indonesia. *Undang-undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Indonesia. *Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010. TLN No. 516.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

D. Sumber lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

Pengadilan Negeri Bogor. “Putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr.”

“Kronologi Kasus Kredit Fiktif Rp 102 M di Bank Syariah Mandiri Bogor,” <https://www.viva.co.id/berita/nasional/453908-kronologi-kasus-kredit-fiktif-rp102-m-di-bank-syariah-mandiri-bogor>. diakses pada tanggal 6 September 2018 pukul 17.00 WIB.

“Ini Peran Notaris BSM Bogor dalam Kasus Kredit Fiktif”
, <https://news.detik.com/berita/2406588/ini-peran-notaris-bsm-bogor-dalam-kasus-kredit-fiktif>, diakses pada tanggal 6 September 2018 pukul 18:00 WIB.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Modul%20%20-%20Bagian%20.pdf, diakses pada tanggal 3 October 2018, pukul 13.00 WIB.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

http://www.ppatk.go.id/luar_negeri/read/45/pendahuluan.html · diakses pada tanggal 6 October 2018, pukul 12.10 WIB

